

Implementasi Program Pemerintah dalam Pembangunan Drainase Jalan Teuku Umar Tulungagung sebagai Upaya Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kebijakan Lingkungan

Dewi Arinda Putri^{1*}, Fahim Kusuma Wardani¹, Adelia Dyah Ayu Maharani¹, Nunun Nurhajati¹

1. Universitas Tulungagung

Email korespondensi: dewiarinda36@gmail.com

How to Cite:

Putri, D. A., *et al.* (2026). Implementasi Program Pemerintah dalam Pembangunan Drainase Jalan Teuku Umar Tulungagung sebagai Upaya Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kebijakan Lingkungan. *Jurnal Widya Mahavira*, 2(1), 16-23

Abstract- *The development of drainage channels is one of the ways local governments implement policies to address flooding and improve urban environmental quality. This study aims to evaluate the implementation of the drainage development program on Teungku Umar Street, Tulungagung Regency, using the policy implementation theory proposed by George C. Edward III, which focuses on four elements: communication, resources, implementers' disposition, and bureaucratic structure. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The informants involved include local government officials, project implementers, village administrative staff, and local residents. The findings indicate that the drainage development has produced initial positive impacts, particularly improvements in the physical condition of drainage channels and a reduction in water stagnation. However, the effectiveness of policy implementation remains suboptimal due to several constraints, including non-continuous communication, limited resources—especially in terms of budget and supervision—an implementation approach that prioritizes physical project completion, and insufficient inter-bureaucratic coordination. Therefore, enhanced communication, strengthened resources, sustained commitment from implementers, and improved inter-agency coordination are required to ensure that flood control objectives and environmental policy goals can be achieved effectively and sustainably.*

Keywords: *drainage development; environmental policy; policy implementation*

Pendahuluan

Tata kelola pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di Kabupaten Tulungagung, tata kelola difokuskan pada penggabungan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam setiap kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur kota. Pemerintah daerah Tulungagung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi dasar hukum untuk menyusun strategi pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu, termasuk langkah-langkah pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan dari pembangunan fisik di daerah tersebut. Strategi ini memfokuskan pada fungsi lingkungan hidup, terutama dalam mengendalikan dampak lingkungan melalui pencegahan, pemulihan, dan pengamanan lingkungan, serta diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpedoman pada prinsip lingkungan (Artha Yoma Nendra Yakthi et al., 2023).

Salah satu elemen penting dalam mencapai pengelolaan lingkungan adalah pengendalian risiko banjir di daerah perkotaan. Kabupaten Tulungagung memiliki kondisi geografis yang menjadikan beberapa tempatnya rawan terkena banjir saat hujan lebat, khususnya di lokasi dataran rendah yang dilewati oleh sungai besar seperti Sungai Brantas. Penelitian mengenai distribusi kawasan yang rentan terhadap banjir di Tulungagung mengindikasikan bahwa situasi ini adalah permasalahan lingkungan dan infrastruktur yang perlu ditangani sejak awal untuk mengurangi efek sosial dan ekonomi yang mungkin timbul.

Permasalahan genangan air di Jalan Teuku Umar serta sekitarnya sering kali disebabkan oleh sistem drainase yang tidak mampu menyalurkan air hujan ke saluran utama dengan baik. Keadaan ini menyebabkan munculnya genangan di jalan yang menghambat aktivitas masyarakat dan berisiko merusak jalan. Di samping itu, penggunaan ruang kota yang tidak sejalan dengan perencanaan drainase yang terintegrasi menjadi suatu tantangan dalam pengaturan kota. Dalam rangka pengelolaan air dan sistem drainase, pemerintah daerah perlu menghadapi tantangan ini dengan kebijakan yang bersifat pencegahan dan penyesuaian terhadap kemungkinan banjir (Kusairi et al., n.d.). Pembangunan saluran drainase di Jalan Teuku Umar adalah salah satu cara pemerintah menerapkan kebijakan untuk mengendalikan banjir dan memperbaiki kualitas lingkungan. Proyek ini tidak hanya terpusat pada pembangunan saluran fisik, tetapi juga menjadi bagian dari taktik pengelolaan lingkungan yang menggabungkan perencanaan ruang, pengelolaan air, dan keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, proyek drainase di Jalan Teuku Umar tidak hanya sekadar infrastruktur, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola kota yang lebih baik serta lingkungan yang sehat dan siap menghadapi banjir.

Kami mengambil teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Mubarak, 2020) sebagai dasar analisis dalam menilai pembangunan sistem drainase di Jalan Teungku Umar, Kabupaten Tulungagung, karena teori ini dapat menjelaskan elemen-elemen yang memengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan publik. Dalam penelitian ini, teori penerapan kebijakan yang digunakan adalah model yang diajukan menegaskan bahwa empat variabel kunci mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi adalah proses di mana informasi tentang kebijakan disampaikan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan masyarakat. Komunikasi yang efektif ditandai oleh kejelasan informasi, konsistensi pesan, dan pemahaman yang seragam di antara semua pihak yang terlibat. Dalam proyek pembangunan drainase di Jalan Teuku Umar, komunikasi memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa tujuan, prosedur, dan teknik pelaksanaan program dipahami oleh para pelaksana proyek dan masyarakat setempat. Ketidakjelasan dalam komunikasi bisa menyebabkan kesalahpahaman dan menghambat proses penerapan kebijakan.

Sumber daya adalah komponen vital yang mendukung penerapan kebijakan. Menurut Edward III, sumber daya mencakup tenaga kerja, anggaran, fasilitas, peralatan, dan otoritas. Untuk pembangunan drainase, sumber daya mencakup ketersediaan dana, kompetensi tenaga teknis, peralatan konstruksi, dan dukungan dari pemerintah daerah. Kekurangan sumber daya dapat menghalangi pelaksanaan program, meskipun kebijakan telah disusun dengan baik. Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesediaan para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai tujuan yang ditetapkan. Pelaksana yang mempunyai komitmen tinggi akan melaksanakan kebijakan dengan optimal. Pada proyek pembangunan drainase di Jalan Teuku Umar, disposisi para pelaksana terlihat dari dedikasi aparat pemerintah dan pihak pelaksana proyek yang menjalankan pekerjaan sesuai dengan rencana, standar teknis, dan tujuan kebijakan untuk pengendalian banjir dan perlindungan lingkungan.

Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, mekanisme kerja, prosedur operasional, dan koordinasi antara berbagai instansi yang terlibat dalam penerapan kebijakan. Jika struktur birokrasi terlalu rumit dan terfragmentasi, koordinasi yang lemah dapat menyebabkan perlambatan

dalam penerapan kebijakan. Dalam program pembangunan drainase, struktur birokrasi melibatkan banyak instansi seperti Dinas Pekerjaan Umum, pemerintah kelurahan, dan kontraktor. Sangat penting untuk memiliki koordinasi yang baik antara instansi agar pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan ini, analisis dapat dilakukan dengan terstruktur untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghalangi pelaksanaan program pembangunan drainase dalam rangka penanggulangan banjir.

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk secara mendalam memahami pelaksanaan program pembangunan drainase di Jalan Antasari, Tulungagung. Pendekatan ini dipilih sejalan dengan pandangan (Sugiyono, 2016) yang mengungkapkan bahwa tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menggali fenomena yang dialami oleh subjek dengan cara menyeluruh melalui deskripsi menggunakan kata-kata dalam konteks yang alami. Lokasi penelitian berada di proyek drainase Jalan Antasari, dengan waktu yang disesuaikan hingga data dianggap cukup lengkap. Informan dipilih secara purposif, yaitu orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam program, seperti dari Dinas Pekerjaan Umum, kontraktor pelaksana, perangkat kelurahan, serta masyarakat setempat. Teknik dalam pengumpulan data meliputi wawancara, observasi di lapangan, dan studi dokumentasi, yang sesuai dengan pendapat (Sugiyono, 2016) tentang perlunya mengumpulkan data dari berbagai sumber dalam konteks alami. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, presentasi data, dan kesimpulan, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2016: 246) bahwa analisis kualitatif berlangsung terus menerus sejak pengumpulan data dimulai hingga diperoleh temuan. Untuk memastikan keabsahan data, triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan data yang didapat dari berbagai sumber dan teknik. Seluruh tahapan penelitian tetap memperhatikan etika, seperti meminta izin dari narasumber dan menjaga kerahasiaan identitas mereka.

Hasil dan Pembahasan

Pembangunan saluran drainase di Jalan Teungku Umar adalah salah satu cara penerapan kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah banjir di kota. Untuk menilai seberapa baik kebijakan ini dilaksanakan, digunakan teori penerapan kebijakan dari George C. Edward III yang menyoroti empat variabel penting, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur pemerintahan. Keempat variabel ini saling berhubungan dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Hasil dari observasi lapangan, termasuk wawancara dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum, perangkat kelurahan, dan masyarakat sekitar, menunjukkan bahwa pembangunan drainase di Jalan Teuku Umar telah meningkatkan kapasitas saluran air dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Saluran yang baru dibangun memiliki ukuran yang lebih besar dan pola aliran yang lebih rapi, sehingga mampu mengurangi genangan air saat hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas drainase belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal. Di beberapa lokasi masih terdapat endapan sedimen dan sampah yang menghambat aliran air. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan drainase tidak hanya bergantung pada aspek fisik, tetapi juga pada pengelolaan setelah pembangunan serta partisipasi masyarakat dalam memelihara fungsi saluran. Temuan ini sejalan dengan pendapat (Sari et al., 2020) yang menjelaskan bahwa sistem drainase di kota akan bekerja secara optimal apabila didukung oleh perawatan yang berkelanjutan dan kesadaran masyarakat akan lingkungan.

Komunikasi (Communion)

Dari sudut pandang Edward III, komunikasi memiliki peranan sebagai alat untuk menyampaikan tujuan, substansi, dan cara pelaksanaan kebijakan kepada para pelaksana dan kelompok yang dituju. Dalam pelaksanaan proyek pembangunan drainase di Jalan Teungku Umar, pihak pemerintah daerah telah melakukan pemberitahuan awal mengenai rencana kegiatan kepada aparat kelurahan/desa serta masyarakat di sekitarnya. Informasi ini mencakup tujuan pembangunan drainase yang bertujuan untuk mengurangi risiko banjir dan memperlancar aliran air.

Namun, komunikasi yang dilakukan belum bersifat berkelanjutan atau mendalam. Sosialisasi umumnya hanya terjadi pada awal pelaksanaan, sedangkan pada fase pelaksanaan dan setelah pembangunan, komunikasi menjadi sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya mengerti akan pentingnya perawatan saluran drainase, yang terlihat dari masih adanya kegiatan pembuangan sampah ke saluran air dan penutupan drainase untuk keperluan pribadi. Selain itu, ketidakjelasan informasi mengenai jadwal dan teknik pekerjaan menimbulkan kebingungan dan keluhan di kalangan masyarakat.

Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah daerah dan pelaksana teknis cukup baik, terutama dalam hal penyampaian spesifikasi teknis dan jadwal proyek. Namun, interaksi dengan masyarakat masih terbatas dan bersifat satu arah, terutama pada tahap sosialisasi awal.

Beberapa anggota masyarakat merasa tidak sepenuhnya mengerti tujuan jangka panjang dari pembangunan drainase, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan lingkungan dan pengendalian banjir. Situasi ini menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam kejelasan dan konsistensi komunikasi.

(Kogoya et al., 2024) menekankan bahwa penerapan kebijakan publik sulit dilakukan dengan baik jika pesan yang disampaikan tidak dipahami dengan tepat oleh kelompok sasaran. Karenanya, dibutuhkan pendekatan komunikasi yang lebih melibatkan masyarakat agar mereka tidak hanya menjadi objek, tetapi juga berperan sebagai subjek dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan.

Situasi ini menandakan bahwa aspek kejelasan, konsistensi, dan frekuensi komunikasi kebijakan belum sepenuhnya terpenuhi, yang berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dan efektivitas pelaksanaan program.

Sumber Daya (Resource)

Sumber daya adalah elemen penting dalam menentukan suksesnya penerapan kebijakan. Dalam proyek pembangunan sistem drainase di Jalan Teungku Umar, tenaga kerja yang terlibat meliputi pegawai dari dinas teknis, perencana konsultan, pengawas di lapangan, dan kontraktor yang bertanggung jawab. Meskipun kompetensi tenaga kerja tersebut cukup baik, jumlah pengawas di lapangan masih sedikit, sehingga pengawasan terhadap mutu pekerjaan tidak dapat dilakukan secara maksimal setiap saat.

Dari segi biaya, pembiayaan untuk pembangunan drainase berasal dari anggaran pemerintah daerah. Keterbatasan dana menyebabkan pelaksanaan proyek dilakukan secara bertahap dan hanya difokuskan pada area-area tertentu yang dianggap paling rentan terhadap banjir. Sebagai hasilnya, beberapa bagian Jalan Teungku Umar masih terkena genangan meskipun proyek sudah dilaksanakan.

Peralatan dan bahan konstruksi yang diperlukan umumnya cukup tersedia, tetapi perawatan setelah selesai pembangunan belum didukung oleh fasilitas dan dana yang cukup. Selain itu, wewenang untuk mengelola drainase mayoritas berada di tingkat kabupaten, sementara pemerintah kelurahan atau desa memiliki batasan dalam melaksanakan pemeliharaan secara mandiri.

Situasi ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, baik dari segi dana, pengawasan, maupun wewenang, menjadi penghalang dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan.

(Adrian Pratama & Zaili Rusli, 2025) menjelaskan bahwa ketersediaan sumber daya tidak hanya meliputi dana dan fasilitas fisik, tetapi juga kemampuan pegawai dalam mengelola dan mengawasi kebijakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk mendukung kelangsungan kebijakan drainase.

Sikap Pelaksana (Disposition)

Sikap pelaksana berhubungan dengan komitmen, kesanggupan, dan niat para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan pembangunan drainase di Jalan Teungku Umar, aparat pemerintah dan pelaksana proyek umumnya menunjukkan sikap yang baik dan keseriusan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan perencanaan yang ada.

Namun, dalam praktik sehari-hari, sikap pelaksana masih lebih berfokus pada pencapaian target fisik proyek, seperti penyelesaian konstruksi drainase, daripada pencapaian tujuan substansial kebijakan, yakni pengurangan banjir yang berkelanjutan. Hal ini terlihat dari kurangnya perhatian terhadap aspek pemeliharaan rutin dan belum optimalnya respons terhadap keluhan masyarakat setelah proyek selesai.

Di samping itu, perbedaan tingkat komitmen di antara pelaksana di lapangan juga berdampak pada kualitas pelaksanaan. Pelaksana yang memahami dengan baik tujuan kebijakan biasanya lebih tanggap, sementara yang lainnya hanya mengikuti prosedur administratif tanpa pemahaman mendalam. Dengan begitu, sikap pelaksana belum sepenuhnya mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam jangka panjang.

Seperti pendapat Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan sangat bergantung pada disposisi dan komitmen para pelaksana, termasuk masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat. Tanpa ada dukungan dari sikap positif, ada risiko kebijakan tidak akan mencapai hasil yang diinginkan.

Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur birokrasi dalam proyek pemeliharaan saluran air di Jalan Teungku Umar melibatkan beberapa lembaga pemerintah dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang cukup terperinci. Dinas teknis memiliki tugas dalam perencanaan serta pelaksanaan proyek, sedangkan pemerintah kecamatan dan kelurahan/desa memiliki fungsi untuk berkoordinasi dengan masyarakat setempat.

Walaupun pembagian tugas sudah ditentukan, kolaborasi antara berbagai instansi masih mengalami beberapa masalah. Proses pengambilan keputusan mengenai isu-isu teknis di lapangan sering kali memakan waktu lama karena harus mengikuti prosedur birokrasi yang berlapis. Selain itu, kurangnya standar operasional prosedur yang jelas dan konsisten mengenai pemeliharaan saluran air setelah proyek selesai membuat pembagian tanggung jawab antar lembaga menjadi tidak jelas.

Kondisi birokrasi yang cenderung kaku dan tidak responsif ini berpengaruh pada lambatnya penanganan masalah banjir yang terjadi setelah penyelesaian pembangunan saluran air.

Struktur yang ada dalam pengelolaan drainase melibatkan beberapa organisasi, termasuk Dinas Pekerjaan Umum, pemerintah kelurahan, dan kontraktor. Meskipun pemisahan tugas sudah diatur dengan jelas, kerja sama antara organisasi belum sepenuhnya efektif. Salah satu hal penting yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya tumpang tindih wewenang dalam perawatan

drainase setelah pembangunan. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab saat terjadi kerusakan kecil atau penyumbatan saluran.

(Indriati Amirullah et al., 2024) menyatakan bahwa birokrasi yang rumit dan tidak terorganisir dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dan menurunkan efektivitasnya. Maka dari itu, penyederhanaan prosedur serta penjelasan tanggung jawab di antara organisasi sangat penting.

Berdasarkan analisis isi dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, dapat disimpulkan bahwa proyek pembangunan saluran drainase di Jalan Teungku Umar, Kabupaten Tulungagung, telah dilaksanakan, namun efektivitasnya masih terhambat oleh berbagai masalah. Aspek komunikasi yang kurang maksimal, terbatasnya sumber daya, sikap pelaksana yang belum sepenuhnya fokus pada keberlanjutan, dan struktur birokrasi yang tidak cukup fleksibel menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kualitas komunikasi, memperkuat sumber daya, menegaskan komitmen para pelaksana, serta memperbaiki koordinasi dalam birokrasi agar tujuan penanggulangan banjir bisa dicapai secara optimal.



Gambar 1. Testing

Gambar tersebut menunjukkan kegiatan pembangunan dan perbaikan drainase di sepanjang Jalan Teungku Umar, yang menjadi bagian dari implementasi program pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi banjir. Terlihat para pekerja sedang melakukan pemasangan saluran drainase dan perbaikan trotoar di tepi jalan, yang bertujuan untuk memperlancar aliran air hujan agar tidak menggenang di badan jalan. Kondisi ini menggambarkan pelaksanaan kebijakan secara nyata di lapangan, khususnya pada aspek fisik pembangunan infrastruktur. Pekerjaan drainase tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas saluran air, mengurangi genangan saat hujan, serta mendukung kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Namun, dari pengamatan lapangan juga dapat dipahami bahwa keberhasilan pembangunan drainase tidak hanya bergantung pada pengerjaan fisik, melainkan memerlukan pemeliharaan berkelanjutan dan dukungan masyarakat agar fungsi drainase tetap optimal dalam jangka Panjang



Gambar 2. Testing

Berdasarkan hasil survei di lapangan, material utama yang digunakan dalam proyek saluran drainase ini mencakup semen, pasir, batu kali, kerikil, beton pracetak (U-ditch atau box culvert), besi tulangan, paving block, dan penutup drainase, yang bertujuan untuk memperkuat struktur saluran air dan meningkatkan kapasitas alirannya. Di samping itu, juga digunakan alat berat serta peralatan kerja seperti gerobak dorong, cetok, mesin pemotong, dan peralatan keselamatan kerja untuk para pekerja. Ketersediaan bahan-bahan untuk proyek ini secara umum sudah mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan drainase, namun keterbatasan anggaran mengharuskan penggunaan bahan dilakukan dengan efisien dan pembangunan dilakukan secara bertahap.

Secara keseluruhan, hasil dari pengamatan dan analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemerintah dalam pembangunan sistem drainase di Jalan Teungku Umar, Kabupaten Tulungagung, telah dilaksanakan dan memberikan dampak positif awal dalam mengurangi genangan air saat hujan. Kondisi fisik dari sistem drainase kini sudah diperbaiki, dan aliran air menjadi lebih lancar dibandingkan sebelum proyek dilaksanakan. Namun, efektivitas program dalam mengatasi banjir masih belum sepenuhnya optimal karena terhambat oleh beberapa tantangan, seperti kurangnya komunikasi berkelanjutan dengan masyarakat, keterbatasan sumber daya terutama dalam hal anggaran dan pengawasan, sikap pelaksana yang masih fokus pada penyelesaian fisik proyek, dan koordinasi antar instansi yang belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, keberhasilan program drainase ini memerlukan penguatan di bidang pemeliharaan, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi antarinstansi agar tujuan penanggulangan banjir dapat dicapai secara berkelanjutan.

Simpulan

Pembangunan sistem drainase di Jalan Teungku Umar, Kabupaten Tulungagung, adalah langkah nyata dari pemerintah daerah dalam menanggulangi banjir dan memperbaiki lingkungan yang secara fisik sudah memberikan hasil positif awal yang terlihat dari peningkatan saluran air dan pengurangan genangan air saat hujan. Meskipun demikian, berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, pelaksanaan program ini belum sepenuhnya mencapai hasil yang maksimal karena ada hambatan dalam komunikasi kebijakan yang belum berjalan secara berkelanjutan dengan masyarakat, keterbatasan sumber daya terutama dalam anggaran dan pengawasan, sikap pelaksana yang lebih fokus pada penyelesaian fisik proyek ketimbang keberlangsungan fungsi drainase, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Maka dari itu, perlu diadakan peningkatan dalam komunikasi dan sosialisasi yang berkelanjutan, penguatan sumber daya dan penegasan kewenangan pemeliharaan di tingkat lokal, penegasan komitmen pelaksana terhadap tujuan jangka panjang dari kebijakan, serta perbaikan dalam koordinasi di dalam birokrasi agar program pembangunan drainase bisa beroperasi secara efektif dan berkesinambungan dalam mengatasi masalah banjir.

Daftar Pustaka

- Adrian Pratama, & Zaili Rusli. (2025). Pemeliharaan Drainase di Kota Pekanbaru. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 2(1), 105–117. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v2i1.527>
- Artha Yoma Nendra Yakthi, Faisal Maulana Putra, Fitri Choirun Nisa, Rizka Fikri Nabilah, & Hany Nurpratiwi. (2023). Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kabupaten Tulungagung dan Peranan Masyarakat Dalam Melestarikan Lingkungan. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(2), 287–299. <https://doi.org/10.55606/concept.v2i2.319>
- Indriati Amirullah, Nurasia Natsir, & Siti Zaleha Soebarini. (2024). The Role of Bureaucratic Structure in the Implementation of The Domestic Wastewater Management Policy in Makassar City. *International Journal of Economics and Management Research*, 3(1), 154–169. <https://doi.org/10.55606/ijemr.v3i1.171>
- Kogoya, Y., Togodly, A., Tingginehe, R. M., Ruru, Y., & Bouway, D. (2024). Evaluation of Policy Implementation (G. Edward III Theory) on the Stunting Prevention and Treatment Program at Waena Health Center, Jayapura City Papua Province. *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)*, 3(2), 233–246. <https://doi.org/10.55927/fjst.v3i2.8105>
- Kusairi, L., Adab, F., & Bahasa, D. (n.d.). *Published by Faculty of Cultures and Languages UIN Raden Mas Said Surakarta Accredited Sinta S3*.
- Mubarok, S., Zauhar, S., & Setyowati, E. (2020). Journal of Public Administration Studies Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. In *Syahrul Mubarak/JPAS* (Vol. 5, Issue 1).
- Sari, W. N., Atsushi, I., Toshiyuki, S., & Dewanti. (2020). The Implementation of Urban Drainage Maintenance to Reduce Inundation Risk. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 1(3). <https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i3.77>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/290900/perda-kab-tulungagung-no-4-tahun-2023>
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/246717/perbup-kab-tulungagung-no-25-tahun-2022>